



## **ANALISIS STRUKTUR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

Arif Potale<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Sri Indriyani S. Dai<sup>✉</sup>, <sup>3</sup>Ivan Rahmad Santoso

[arifpotale23@gmail.com](mailto:arifpotale23@gmail.com)<sup>1</sup>, [sriindriyani\\_dai@ung.ac.id](mailto:sriindriyani_dai@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [ivan\\_santoso@ung.ac.id](mailto:ivan_santoso@ung.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

### **Informasi Artikel**

#### *History of Article*

Received September 2024

Accepted November 2024

Published December 2024

#### *Keywords:*

Struktur Belanja Pemerintah ;  
Kemiskinan.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa 13 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, periode 2013-2022, bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi belanja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya peningkatan fungsi belanja ekonomi akan meningkatkan kemiskinan. Fungsi belanja Perlindungan Sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dimana peningkatan fungsi belanja Perlindungan Sosial dapat menurunkan kemiskinan, Fungsi belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja Pendidikan akan meningkatkan kemiskinan. Fungsi belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Yang artinya peningkatan Kesehatan dapat meningkatkan Kemiskinan. Fungsi belanja pariwisata & budaya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya peningkatan fungsi belanja pariwisata dan budaya menurunkan maka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

### **Abstract**

This study aims to determine the Impact of Regional Government Spending Structure on Poverty Levels in Eastern Indonesia. The data used in this study are secondary data in the form of 13 provinces in Eastern Indonesia, for the period 2013-2022, sourced from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance. The method used is multiple linear regression analysis using panel data. The results of the analysis show that the economic spending function has a positive and significant effect on poverty. This means that an increase in the economic spending function will increase poverty. The Social Protection spending function has a negative and significant effect on poverty. Where an increase in the Social Protection spending function can reduce poverty, the Education spending function has a positive and significant effect on poverty. This means that every increase in the Education spending function will increase poverty. The Health spending function has a positive and significant effect on poverty. Which means that an increase in Health can increase Poverty. The tourism & culture spending function has a negative and significant effect on poverty. This means that an increase in the tourism and culture spending function reduces poverty in Eastern Indonesia.

© 2024, Universitas Negeri Gorontalo

✉ Corresponding author : Sri Indriyani S. Dai

Address: Jl. Arif Rahman Hakim, Wumialo, Gorontalo

E-mail: [sriindriyani\\_dai@ung.ac.id](mailto:sriindriyani_dai@ung.ac.id)

p-ISSN : 1979-1607

e-ISSN : 2747-0059

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. kemiskinan disebut juga sebagai masalah sosial, dan bahkan merupakan masalah sosial yang paling rumit dan sulit, karena kemiskinan mendatangkan berbagai gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat. kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Reza Attaburrobbi Annur; 2013). Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang saja, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Perbedaannya hanya terletak pada besar kecilnya tingkat kemiskinan yang dihadapi serta tingkat kesulitan yang mengatasinya, yang dipengaruhi oleh luas wilayah, dan jumlah penduduk dinegara tersebut.

Menurut penelitian Andika dan Hastarini (2011), kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan

hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Selain itu kemiskinan yang semakin tinggi disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang tinggi. Menurut Santoso (2013) peningkatan kemiskinan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi yaitu pemerintah berperan dalam membuat kebijakan fiskal sedangkan sektor swasta dalam pengembangan untuk mengatasi kemiskinan membuka kesempatan kerja dan masyarakat sebagai sumber daya manusia yang merupakan input produksi.

Indonesia merupakan wilayah yang berada pada posisi terbelah berkembang sehingga kemiskinan merupakan penyakit yang menjadi perhatian pengelolah roda kebijakan yaitu pemerintah. Pemerintah diindonesia sadar akan cara itu sehingga dapat memperhatikan kerja dari roda perekonomian diindonesia. agar dapat melaksanakan pembangunan serta perluasan secara berkepanjangan perekonomian, agar dapat terlaksananya pembangunan nasional.

Sasaran pembangunan nasional dilaksanakan pada bidang pembangunan yang telah di jabarkan melalui pembangunan jangka panjang serta pendek. Ada beberapa pokok yang kompleks untuk kesuksesan pemerataan pembangunan nasional yaitu penurunan penduduk yang berkecukupan Fabiana Meijon Fadul, (2019).

Sedangkan Suparmoko (2006) menjelaskan yang mana kemiskinan menjadi suatu kewajaran yang mendapatkan penyelesaian dan perhatian yang tepat disebabkan untuk memperlancar pemerataan dan pembangunan sehingga diperlukan peningkatan pada pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan dalam negeri yang diselenggarakan secara merata di seluruh tanah air agar tidak ada kelompok atau sebagian masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia, serta patut sehingga dapat di anggap kepada rakyat secara merata. Fabiana Meijon Fadul, (2019).

Untuk memajukan pelaksanaan ekonomi dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih besar agar dapat mengurangi tingkat orang miskin sehingga dapat mengelola kehidupan yang cocok bagi rakyat Indonesia yang alhasil dapat terwujudkan kesejahteraan masyarakat terutama di Indonesia yang menjadi tujuan dalam pembangunan nasional. (E. Susanto et al., 2018).

Indonesia memiliki 34 provinsi saat sebelum dilaksakannya pemekaran daerah, provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam perjalannya, ternyata kedua Kawasan tersebut memperhatikan kecenderungan bahwa provinsi yang terletak di kawasan barat Indonesia pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang cepat dan pesat dibandingkan daerah atau provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia. (R. Susanto & Pangesti, 2021).

Republik Indonesia Serikat (RIS) membentuk suatu kawasan timur Indonesia yang meliputi, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Badan Pusat Statistik, (2018).

Dewasa ini tujuan dari pada belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi tentu agar bisa

mengoptimalkan sektor-sektor strategis di setiap wilayah pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia. Selanjutnya ketika belanja pemerintah berdasarkan fungsi dapat dioptimalkan dan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah, maka tentu dapat meminimalisir tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. berbanding terbalik ketika belanja pemerintah tidak optimal dan tidak tepat sasaran maka tentu dapat meningkatkan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah, maka peneliti perlu untuk menganalisis lebih jauh tentang “Analisis Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia”

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari 13 Provinsi yakni dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan September 2023.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pada pendekatan ini menjabarkan permasalahan serta di analisis berupa angka mulai dari pengumpulan penafsiran sampai mendapatkan hasil akhir. Penelitian kuantitatif diperlukan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel.

### **Sumber Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan catatan-catatan, dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Serta mengumpulkan laporan-laporan yang

berkaitan dengan data kemiskinan, dan data anggaran realisasi belanja berdasarkan fungsi yaitu fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pelayanan umum, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan sosial, dan fungsi perumahan dan fasilitas umum. Data sekunder ini didapat dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian keuangan (Kemenkeu). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang dianggap relevan mengenai penelitian ini.

**Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda data panel, data panel adalah gabungan dari data cross section dan data time series, data cross section, diperoleh dari data 13 Provinsi di Indonesia. Sedangkan data time series diambil dari tahun 2018-2022. Maka persamaan terbentuk dari variabel independen dan dependen sebagai berikut :

$$Pov_{it} = \alpha_0 + \beta_1 BFE_{it} + \beta_2 BFPS_{it} + \beta_3 BFP + \beta_4 BFK + \beta_5 BFPB + \epsilon_{it}$$

Dimana:

- Pov = Kemiskinan
- $\alpha_0$  = Konstanta/ Intercept
- $\beta_{1,2,3,4,5}$  = Koefisien Regresi Parsial
- BFE = Belanja Fungsi Ekonomi
- BFPS = Belanja Fungsi Perlindungan Sosial
- BFP = Belanja Fungsi Pendidikan
- BFK = Belanja Fungsi Kesehatan
- BFPB = Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya
- $\epsilon$  = Error
- i = Cross Section
- t = Time Series

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pemilihan Model**

Sebelum melakukan penentuan model regresi data panel maka perlu dilakukan uji untuk menentukan model regresi data panel. Penentuan model penelitian ini dilakukan dengan mengestimasi setiap model yang akan digunakan dalam melakukan analisis penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang relevan, dalam pemilihan model terdiri dari dua yakni Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow diperuntukan mengambil keputusan dari kedua model yang dapat dipilih yakni CEM dan FEM dengan melihat nilai dari  $\rho$ -cross section F. sedangkan Uji Hausman diperuntukan untuk mengambil keputusan dari kedua model yang dapat dipilih antara FEM dan REM dengan melihat nilai  $\rho$ -cross section random.

Tabel 1 Pemilihan Model

Pengujian	Test	Prob.	Keputusan
Uji Chow	Cross Section F	0.0000***	FEM ( $\rho < \alpha$ )
Uji Hausman	Cross Section Random	0.0089***	FEM ( $\rho < \alpha$ )

Keterangan : \*\*\*) signifikan di 1%, \*\*) signifikan di 5% dan \*) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan  
 Sumber: Hasil Olahan, 2024.

Berdasarkan hasil estimasi sebelumnya pada Tabel 4.4 dapat dibandingkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mode fixed effect model, hal ini dikarenakan dalam tahapan pengujian Chow-Test terlihat  $\rho$ -cross section F signifikan pada tingkat alpha 1% dan selanjutnya pada Hausmant-Test terlihat bahwa  $\rho$ -cross section random kurang dari tingkat kepercayaan 5% sehingga dalam penentuan ini digunakan fixed effect model.

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil dari analisis regresi yang telah diestimasi dan dilakukan pemilihan model data panel, maka hasil analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Berikut hasil dari estimasi menggunakan Fixed Effect Model yang tersaji dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Dengan Model (Fixed Effect)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.76994	0.639346	19.97344	0.0000***
LOG(BFE?)	0.040465	0.023173	1.746233	0.0835*
LOG(BFPS?)	-0.063462	0.019276	-3.292319	0.0013***
LOG(BFP?)	0.080931	0.016212	4.992056	0.0000***
LOG(BFK?)	0.061469	0.028657	2.144941	0.0341**
LOG(BFPB?)	-0.108851	0.023704	-4.592130	0.0000***

Keterangan : \*\*\*) signifikan di 1%, \*\*) signifikan di 5% dan \*) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan  
 Sumber: Hasil Olahan, 2024.

Berdasarkan Hasil Estimasi Pada Tabel 4.2 Maka Model Penelitian Ini menjadi:

$$\text{LOG(POVit)} = 12.76994 + 0.040465 \text{ Log(BFEit)} - 0.063462 \text{ Log(BFPSit)} + 0.080931 \text{ Log(BFP)} + 0.061469 \text{ Log(BFK)} - 0.108851 \text{ Log(BFPB)} + \epsilon_{it}$$

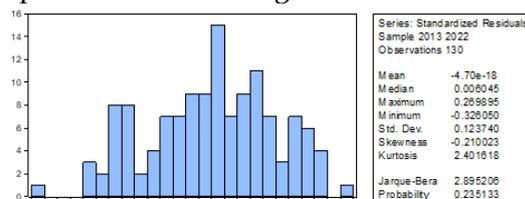
Model inferensi diatas dapat di intepretasikan dalam kalimat sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan tanpa dipengaruhi oleh variabel independen apapun dalam model penelitian ini bernilai 12.76994 Rupiah.
  - 2) Belanja Fungsi Ekonomi (BFE) berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan Belanja Fungsi Ekonomi sebesar 1 rupiah akan meningkatkan Kemiskinan sebesar 0.040465 Rupiah.
  - 3) Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS) sebesar 1 Rupiah maka akan menurunkan Kemiskinan sebesar -0.063462 Rupiah.
  - 4) Belanja Fungsi Pendidikan (BFP) berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 1 rupiah akan meningkatkan Kemiskinan sebesar 0.080931 Rupiah.
  - 5) Belanja Fungsi Kesehatan (BFK) berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 1 rupiah akan meningkatkan Kemiskinan sebesar 0.061469 Rupiah.
- Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya (BFPB) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya (BFPB) sebesar 1 Rupiah maka akan menurunkan Kemiskinan sebesar -0.108851 Rupiah.

### Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas Residual

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dari variabel pengganggu atau nilai residu. Hal ini bisa diketahui dengan membandingkan tingkat alpha sebesar (1%, 5%, 10%) dengan nilai Jarque-bera yang diperoleh dari hasil regresi.



Keterangan : \*\*\*) signifikan di 1%, \*\*) signifikan di 5% dan \*) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan  
 Sumber: Hasil Olahan, 2024.

**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Residual**  
 Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa Nilai Jarque-Bera yang diperoleh sebesar 2.895206 dengan nilai  $\rho$  (Prob) sebesar 0.235133 yang bernilai lebih Besar jika dibandingkan dengan tingkat alpha (1%, 5%, 10%). Sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

#### b) Uji Multikoleniaritas

Beberapa hubungan linier (Pendeteksian Multikoleniaritas) dapat dimanifestasikan secara statistik (VIF) maupun matematis (Matriks). Dan dalam pengujian ini menggunakan salah satunya saja yakni dalam bentuk statistik (VIF) sedangkan dalam bentuk matematis kurang cocok pada data panel. faktor varians inflasi (Vector Inflation Factor/VIF) dilakukan dengan meregresikan masing-masing variabel bebas. Dimana nilai  $R_2$  digunakan sebagai landasan mengukur korelasinya, maka nilai VIF antara lain sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Multikoleniaritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.408764	3461.785	NA
LOG(BFE)	0.000537	3236.168	1.997172
LOG(BFPS)	0.000372	1842.127	3.236517
LOG(BFP)	0.000263	1646.032	3.004296
LOG(BFK)	0.000821	4846.206	2.790838
LOG(BFPB)	0.000562	2692.712	2.365428

Sumber : Hasil Olahan Eviews, (2024)

Hasil Pengujian Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai dari VIF Kelima Variabel

Independent kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ) maka dengan demikian, dalam model penelitian ini tidak terjadi Multikoleniaritas antara variabel Independent.

c) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dengan heteroskedastisitas mengandung konsekuensi serius pada estimator metode OLS karena tidak lagi BLUE. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah suatu model mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak. Uji Gletsjer digunakan dalam tahapan pengujian ini, dimana hanya membandingkan nilai dari estimasi absolute residual (RESABS) dengan Variabel bebas berikut ini.

**Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.26E+10	4.99E+10	0.853108	0.3954
BFE	0.511353	0.041947	12.19037	0.8620
BFPS	0.615098	0.892045	0.689537	0.4919
BFP	-0.018363	0.026168	-0.701753	0.4843
BFK	0.049873	0.099382	0.501831	0.6168
BFPB	-3.018016	1.264885	-2.386001	0.0887

Sumber : Hasil Olahan Eviews, (2024)

**Pembahasan**

Setelah melakukan pengujian dari estimasi pada model maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai Analisis Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia. Dibawah ini merupakan Hasil Pengujian dari Masing-masing Variabel bebas Terhadap Variabel Kemiskinan Tahun 2013-2022.

4.2.1 Pengaruh Belanja Fungsi Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan Hasil Analisis dapat diketahui bahwa Belanja Fungsi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan timur indonesia. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi ekonomi dari total pengeluaran APBN akan Meningkatkan Kemiskinan sebesar 0.040465 rupiah.

Belanja fungsi ekonomi adalah pengeluaran pemerintah untuk kegiatan ekonomi seperti perdagangan, usaha kecil menengah maupun mikro, tenaga kerja, pertanian, pertambangan, bahan bakar, transportasi serta pembangunan fasilitas sarana dan prasarana. Fokus prioritas pada fungsi ekonomi juga tercermin dari luasnya

pengembangan produk bagi UKM di masyarakat. Hal ini berdampak positif bagi pembangunan negara, karena pemerintah menyediakan fasilitas ekonomi untuk mendorong mobilisasi keterampilan yang ada dengan harapan masyarakat lebih kreatif dan mandiri (Ayustika Isminanda, 2019).

Akan tetapi program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui bantuan sosial hanya dapat dinikmati oleh sebagian pihak. Komponen lain dari fungsi belanja ekonomi yakni pembangunan infrastruktur, (Safitri, 2021) menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, biaya yang terkait dengan fungsi ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan, karena dapat diamati bahwa infrastruktur tidak hanya terlihat segera setelah pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur pasti membutuhkan banyak tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja akan berdampak pada produktivitas yang tinggi dan pengurangan kemiskinan.

Selain itu, belanja yang tidak efisien atau terlalu fokus pada sektor-sektor yang tidak berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja atau peningkatan pendapatan masyarakat miskin juga dapat memperburuk masalah kemiskinan. Jika sebagian besar dana digunakan untuk proyek-proyek besar yang melibatkan perusahaan besar atau proyek-proyek yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, maka kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memperdalam kesenjangan antara kaya dan miskin.

Selanjutnya, belanja yang tidak tepat sasaran atau tidak didukung oleh kebijakan yang baik dapat mengakibatkan pemborosan anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk memerangi kemiskinan dapat terbuang sia-sia atau digunakan tidak efisien, tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam situasi di Kawasan Timur Indonesia, di mana kemiskinan masih menjadi

tantangan serius, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa belanja ekonomi yang dilakukan memiliki dampak positif yang signifikan dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan pemantauan yang ketat terhadap bagaimana belanja tersebut berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2021) menjelaskan bahwa fungsi belanja ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi belanja ekonomi tidak langsung dirasakan dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka panjang belanja pada sektor ekonomi dapat mengetaskan kemiskinan.

4.2.2 Pengaruh Belanja Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan Berdasarkan Hasil Analisis dapat diketahui bahwa Belanja Fungsi Perlindungan Sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan timur Indonesia. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi perlindungan sosial dari total pengeluaran APBN akan menurunkan Kemiskinan sebesar -0.063462 rupiah. Belanja fungsi perlindungan sosial dapat memiliki dampak signifikan terhadap penanganan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Ini terkait dengan beberapa aspek penting.

Pertama, belanja perlindungan sosial dapat memberikan jaringan pengaman bagi masyarakat yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Program-program seperti bantuan tunai, beasiswa pendidikan, atau bantuan kesehatan dapat membantu masyarakat yang rentan, terutama yang memiliki pendapatan rendah, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini akan membantu mencegah mereka terjerat dalam kemiskinan yang lebih dalam akibat berbagai beban ekonomi yang mereka hadapi.

Kedua, belanja perlindungan sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan

memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa atau program kesehatan gratis atau terjangkau, masyarakat di Kawasan Timur Indonesia dapat lebih mudah mengakses pendidikan yang berkualitas dan perawatan kesehatan yang diperlukan. Ini bukan hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga membantu mengurangi kemungkinan mereka terjerat dalam lingkaran kemiskinan akibat masalah pendidikan dan kesehatan yang tidak terpenuhi.

Selain itu, belanja perlindungan sosial juga dapat membantu memicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, ini dapat meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal. Ini menciptakan lapangan kerja tambahan dan peluang usaha, yang merupakan langkah penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Terakhir, belanja perlindungan sosial dapat membantu meredakan konflik sosial yang mungkin muncul akibat ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi di Kawasan Timur Indonesia. Dengan memberikan manfaat sosial kepada mereka yang membutuhkannya, hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan stabilitas wilayah.

TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (TNP2K, 2015).

Kemenkeu RI (2021) belanja alokasi dalam fungsi belanja pemerintah dalam sektor perlindungan sosial berupa (1) Peningkatan penerimaan kartu sembako (2) Refitalisasi pelaksanaan PKH (3) Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Penderita HIV/AIDS dan beberapa kasus sosial lainnya

(4) Pengawasan/perlindungan secara menyeluruh terhadap korban kekerasan di bawah umur, keadaan darurat, eksploitasi dan pornografi (5) Mendukung perempuan dengan memperkuat lembaga advokasi perempuan (6) Pemenuhan kewajiban negara untuk membayar tunjangan pensiun dan jaminan kesehatan kepada PNS dan TNI/Polri serta pensiunan veteran.

Secara keseluruhan, belanja fungsi perlindungan sosial dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengatasi kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia dengan memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat rentan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mengurangi konflik sosial.

Penelitian ini senada dengan yang dilakukan oleh (Sihombing et al., 2022) yang menyatakan bahwa fungsi perlindungan sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Dengan adanya perlindungan sosial dari negara terhadap masyarakat maka masyarakat menjadi terjamin dalam akses terhadap perlindungan sosial, dan akan mendapatkan akses terhadap kesempatan baik di bidang ekonomi maupun Pendidikan.

#### 4.2.3 Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan Hasil Analisis dapat diketahui bahwa Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan timur Indonesia. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi Pendidikan dari total pengeluaran APBN akan Meningkatkan Kemiskinan sebesar 0.080931 rupiah.

Belanja fungsi pendidikan seharusnya menjadi investasi penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, belanja pendidikan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada masalah kemiskinan.

Pertama-tama, belanja pendidikan yang tidak efisien dan terkendali dapat menghasilkan hasil yang tidak memadai. Jika dana pendidikan tidak digunakan secara tepat atau jika terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, maka kualitas pendidikan di wilayah tersebut bisa tergerus. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak mendapatkan pendidikan berkualitas yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang mereka di pasar kerja.

Kedua, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga dapat menjadi masalah serius. Kawasan Timur Indonesia seringkali menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur pendidikan yang kurang berkembang. Jika belanja pendidikan tidak memperhatikan masalah ini, maka daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, sehingga mengakibatkan beberapa masyarakat tetap terjebak dalam kemiskinan.

Selain itu, jika belanja pendidikan tidak diikuti dengan perbaikan kualitas pengajaran dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, maka lulusan pendidikan mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi di antara lulusan dan meningkatkan risiko kemiskinan.

Dalam konteks Kawasan Timur Indonesia, di mana pendidikan berkualitas dan akses yang merata sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, perlu adanya fokus pada pengelolaan yang efisien, perbaikan dalam akses pendidikan, dan peningkatan kualitas pengajaran. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat lokal juga penting untuk memastikan bahwa belanja pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengangkat kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

Keberhasilan belanja pemerintah pada sektor pendidikan yakni mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, yang diukur dengan angka partisipasi sekolah. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan kasar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah yakni minimal lamanya bersekolah 12 tahun (Bappenas, 2017).

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pendidikan di pengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan (Herlith, Aditya Pratama, 2016). Sedangkan menurut (Muassarah et al., 2022) pendidikan dapat membantu orang keluar dari masalah kemiskinan karena semakin lamanya pendidikan yang ditempuh maka akan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu dan menciptakan solusi.

Akan tetapi, dalam penelitian ini belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Fenomena ini dapat disebabkan karena, 1) Masih sulitnya bagi masyarakat miskin untuk melanjutkan studi setelah lulus SMA yang biasanya dikaitkan dengan kurangnya biaya, sementara gelar sarjana sering dipersyaratkan untuk beberapa bidang pekerjaan dengan pendapatan dalam pendapatan yang tinggi. 2) Banyak lulusan sarjana memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan keahliannya atau penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan. 3) Adapun lulusan sarjana yang lebih memilih gaji kecil daripada menganggur, hal ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang menawarkan upah pokok yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiberti, 2014), belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan apabila terpenuhinya penyesuaian dalam menentukan kebijakan tepat sasaran

dan anggaran finansial tercukupi mengingat kesulitan yang sama diterima oleh pemerintah dalam mengumpulkan pajak dalam daerahnya.

#### 4.2.4 Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan Hasil Analisis dapat diketahui bahwa Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan timur Indonesia. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi Kesehatan dari total pengeluaran APBN akan Meningkatkan Kemiskinan sebesar 0.061469 rupiah. Belanja fungsi kesehatan adalah elemen penting dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, belanja kesehatan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada masalah kemiskinan.

Pertama, belanja kesehatan yang tidak mencukupi atau tidak efisien dapat mengakibatkan kualitas layanan kesehatan yang rendah. Kawasan Timur Indonesia seringkali memiliki tantangan dalam hal akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, sumber daya medis, dan tenaga medis yang berkualitas. Jika belanja kesehatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka layanan kesehatan yang tidak memadai dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang tidak teratasi, yang pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan.

Kedua, ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan juga bisa menjadi masalah serius. Kawasan Timur Indonesia seringkali memiliki populasi yang tersebar di daerah pedesaan dan terpencil, sehingga akses terhadap fasilitas kesehatan dapat menjadi sulit. Jika belanja kesehatan tidak memperhatikan masalah ini atau tidak memprioritaskan akses kesehatan yang merata, maka sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan

akibat masalah kesehatan yang tidak teratasi.

Selanjutnya, dalam penggunaan dana kesehatan yang tidak tepat sasaran dapat menghambat efektivitas belanja kesehatan. Jika dana-dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan atau membeli obat-obatan digunakan dengan tidak benar, maka manfaatnya tidak akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat meningkatkan ketidakesetaraan dalam akses kesehatan dan memperdalam masalah kemiskinan.

Belanja fungsi kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang memiliki masalah kesehatan, mereka tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya. Tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Sebagai negara berkembang yang sangat rawan dengan masalah kesehatan, fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan harus diatur sedemikian rupa oleh pemerintah.

Campur tangan pemerintah dalam hal belanja di sektor kesehatan yang merupakan bagian dari indeks pembangunan manusia. Anggaran belanja Kesehatan Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa anggaran belanja kesehatan pemerintah pusat harus mengalokasikan setidaknya 5% dari APBN tanpa memotong pendapatan dan setidaknya 10% dari APBD tanpa memotong pendapatan (Palenewen dkk, 2018). Masalah selanjutnya yang terjadi ialah jika mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kesehatan maka, dapat diidentifikasi bahwa belanja pemerintah dalam kesehatan kurang optimal ditambah lagi dengan masyarakat tidak memiliki akses terhadap kesehatan.

Dalam konteks Kawasan Timur Indonesia, di mana akses kesehatan yang merata dan kualitas layanan kesehatan yang baik sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, perlu adanya pengelolaan yang bijak dan akuntabilitas dalam belanja fungsi

kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana kesehatan digunakan dengan tepat, infrastruktur kesehatan ditingkatkan, dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas diperluas ke daerah-daerah terpencil. Hal ini akan membantu memastikan bahwa belanja kesehatan benar-benar berdampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

Hasil penelitian ini senada dengan yang dilakukan oleh (Taruno, 2019) yang menjelaskan bahwa Fungsi Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini didasari oleh banyak masyarakat tidak bisa mengakses kesehatan dan belanja pemerintah disektor kesehatan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan indikasi bahwa belanja kesehatan memiliki korelasi positif terhadap kemiskinan.

#### 4.2.5 Pengaruh Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya Terhadap kemiskinan

Berdasarkan Hasil Analisis dapat diketahui bahwa Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan timur indonesia. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi Pariwisata dan Budaya dari total pengeluaran APBN akan menurunkan Kemiskinan sebesar -0.108851 rupiah. Belanja fungsi pariwisata dan budaya memiliki potensi besar untuk berdampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini terkait dengan beberapa aspek penting.

Pertama, investasi dalam sektor pariwisata dan budaya dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan. Kawasan Timur Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam dan unik, seperti keindahan alam, tradisi budaya, dan kerajinan tangan lokal. Dengan mempromosikan pariwisata dan budaya, masyarakat lokal dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah yang

berkelanjutan, seperti homestay, kerajinan tangan, atau kuliner tradisional. Ini akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan sumber penghasilan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, sektor pariwisata dan budaya juga dapat mempromosikan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Untuk mendukung perkembangan pariwisata, seringkali diperlukan investasi dalam jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, yang pada gilirannya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja.

Selain itu, pariwisata dan budaya juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya dan lingkungan. Program-program budaya yang terlibat dalam pelestarian warisan lokal, serta praktik pariwisata yang berkelanjutan, dapat membantu menjaga lingkungan dan budaya yang unik di Kawasan Timur Indonesia. Ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan jangka panjang, tetapi juga dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal terhadap warisan mereka sendiri.

Alokasi ini berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk pengembangan destinasi pariwisata dan budaya prioritas di kementerian/lembaga. Destinasi wisata dan budaya prioritas dikembangkan melalui kegiatan yang meliputi: (1) Pengembangan kawasan wisata strategis, perlindungan budaya, pelaksanaan event dan lokasi geografis. (2) Penguatan kota wisata dan budaya. (3) Pengembangan ruang dan fasilitas kreatif untuk pendidikan dan pelatihan kreatif (CREATE). (4) Pembangunan dan revitalisasi desa adat. (5) Pembangunan jalan dan koridor fasilitas transportasi lainnya (Kemenkeu RI, 2021).

Output belanja pariwisata dan budaya menjadi kontribusi yang baik bagi daerah dan nasional. Semua kegiatan yang

berhubungan dengan pariwisata menciptakan pendapatan bagi masyarakat setempat. Pendapatan dari transaksi antara wisatawan dan tuan rumah berupa pembelian produk dan penggunaan jasa oleh wisatawan. Pengeluaran pariwisata tidak hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pariwisata seperti hotel, restoran, biro perjalanan, dan pemandu wisata. Pendapatan pariwisata menciptakan struktur ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendorong lebih banyak kedatangan wisatawan dan akhirnya merangsang perekonomian masyarakat.

Dalam konteks Kawasan Timur Indonesia, yang seringkali masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan, investasi dalam sektor pariwisata dan budaya memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, ini harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan budaya, serta inklusi masyarakat lokal dalam manfaat ekonomi yang dihasilkan. Hal ini akan membantu menciptakan perkembangan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kawasan Timur Indonesia.

Penelitian ini selaras dengan yang dilakukan oleh (Hartono, 2023) yang mengemukakan bahwa Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya signifikan negatif dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh Sektor pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, retribusi pendapatan, dan penguatan neraca pembayaran. Konsumsi wisatawan mancanegara sebagai bentuk alternatif dari ekspor dengan berkontribusi berupa penerimaan devisa. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang modal dan menghasilkan barang-barang dan jasa, yang pada akhirnya menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja dan retribusi pendapatan

yang berdampak kepada pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar tempat wisata.

## KESIMPULAN

Fungsi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi belanja ekonomi dapat meningkatkan kemiskinan di Kawasan timur Indonesia dan hal tersebut mampu dijelaskan secara nyata. Fungsi Perlindungan Sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi belanja Perlindungan Sosial dapat menurunkan kemiskinan di Kawasan timur Indonesia dan hal tersebut mampu dijelaskan secara nyata. Fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi belanja Pendidikan dapat meningkatkan kemiskinan di Kawasan timur Indonesia dan hal tersebut mampu dijelaskan secara nyata. Fungsi Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi belanja Kesehatan dapat meningkatkan kemiskinan di Kawasan timur Indonesia dan hal tersebut mampu dijelaskan secara nyata. Fungsi Pariwisata dan Budaya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Artinya bahwa setiap peningkatan fungsi belanja Pariwisata dan Budaya dapat menurunkan kemiskinan di Kawasan timur Indonesia dan hal tersebut mampu dijelaskan secara nyata.

## REFERENSI

- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Ekonosia.
- Ajija, Shochrul R, D. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.

Akhmad, Achسانی, N. A., Tambunan, M., & Mulyo, S. A. (2012). Impact Of Fiscal Policy On The Agricultural Development In An Emerging Economy: Case Study From The South Sulawesi, Indonesia. *International Research Journal Of Finance And Economics*, 96(August), 101-112.

Alfionika, R., Yulmardi, Y., & Hardiani, H. (2021). Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(1), 47-58. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i1.12456>

Amelia, D. (2021). Dampak Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Dipulau Sulawesi.

Ayustika Isminanda, A. D. B. B. (2019). Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Fungsi Ekonomi Di Indonesia (Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2018). *Correspondencias & Análisis*, 15(18), 1-23.

Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan ( Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11-28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>

- Dahiri Dan Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Analysis Of Effect Of Government Expenditure And Economic. *Jurnal Budget Analisis*, 169-183.
- Denni Sulistio Mirza. (2018). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *Jejak: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 4(2), 102-113.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. 1-10.
- Hartono, D. (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mirai Manajemen*, 8(1), 405-411.
- Herlith, Aditya Pratama, R. R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas Di Indonesia Tahun 2015-2019. *July*, 1-23.
- Jaya Bahwiyanti, A. S. (2020). *Jieb : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5(November), 1-12.  
[Http://Ejournal.Stiepancasetia.Ac.Id/Index.Php/Jieb](http://Ejournal.Stiepancasetia.Ac.Id/Index.Php/Jieb)
- Muassarah, A., Hardi, E. A., & Khairiyani. (2022). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, Pekerjaan Dan Jumlah Tanggungan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Di Desa Teluk Rendah Ilir. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(3), 37-47.
- Novita, B., & Anisa, N. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2015.  
[Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Pe\\_nelitian/Detail/116332](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Pe_nelitian/Detail/116332)
- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55-66.  
[Https://Doi.Org/10.22437/Paradigma.V14i2.6948](https://Doi.Org/10.22437/Paradigma.V14i2.6948)
- Safitri, M. I. D. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.  
[Https://Doi.Org/10.33105/Itrev.V6i2.339](https://Doi.Org/10.33105/Itrev.V6i2.339)
- Sasana, H., & Kusuma, P. (2018). Government Expenditure And Poverty In Indonesia. *Kne Social Sciences*, 3(10), 142.  
[Https://Doi.Org/10.18502/Kss.V3i10.3125](https://Doi.Org/10.18502/Kss.V3i10.3125)
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.

- <https://doi.org/10.33105/Itrev.V5i2.170>
- Sihombing, P. R., Muslianti, D., & Yunita. (2022). Retraction Notice To “Apakah Dana Desa Dan Fungsi Belanja Apbd Mampu Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia?” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 236-243. <https://doi.org/10.11594/Jesi.02.02.12>
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2018). Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.29264/Jinv.V13i1.2435>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/Jabe.V7i2.7653>
- Taruno, H. T. (2019). Public Spending And Poverty Reduction In Indonesia: The Effects Of Economic Growth And Public Spending On Poverty Reduction In Indonesia 2009-2018. *The Indonesian Journal Of Planning And Development*, 4(2), 49-56. <https://doi.org/10.14710/ljpd.4.2.49-56>
- Yusri, A. (2022). Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, And Education? Evidence From Aceh, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, 6(1), 1-20. <https://doi.org/10.33105/Itrev.V6i1.249>
- Zakariya, A. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Riset Pembangunan*, 12(2). Ali, O., Osmanaj, V., Alryalat, M., Chimhundu, R., & Dwivedi, Y. K. (2023). The impact of technological innovation on marketing : individuals , organizations and environment : a systematic review. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2210661>
- Lieke, S., Spiller, A., & Busch, G. (2023). Can consumers understand that there is more to palm oil than deforestation? *Sustainable Production and Consumption*, 39, 495-505. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.05.037>